



MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

محكمة شرعية آچيه

Jln. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 BANDA ACEH 23242

Email : ms.aceh@gmail.com Home Page : www.ms-aceh.go.id

Nomor : W1-A/1327 /PL.07/VI/2019
Sifat : **Segera**
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Permintaan Dokumen RKBMN Tahun 2021

10 Juni 2019

Yth :

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh
2. Sekretaris Pengadilan Negeri se-Aceh
3. Sekretaris Mahkamah Syariah se-Aceh
4. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
5. Sekretaris Pengadilan Militer I.01 Banda Aceh

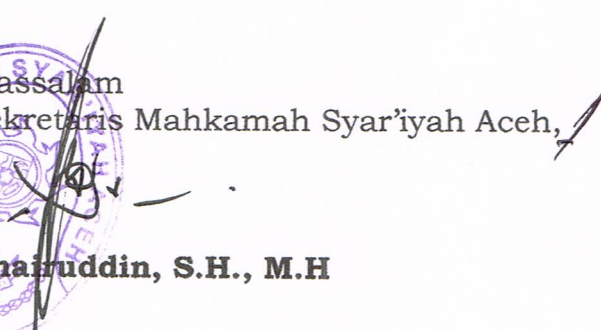
Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 223/BUA.4/PL.07/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, perihal permintaan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Sekretaris masing-masing Satker agar mengisi pengajuan RKBMN Tahun Anggaran 2021 untuk pengadaan dan pemeliharaan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).
2. Mengirimkan RKBMN dalam bentuk hardcopy dan sudah ditanda tangani serta stempel dari masing-masing Kuasa Pengguna Barang (*asli*).
3. Untuk satker yang mengajukan usulan Pengadaan Rumah Negara agar dilampirkan data dukung berupa hasil konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat terkait dengan Pembangunan Rumah Negara.

Kelengkapan usulan RKBMN tersebut segera dikirimkan ke Mahkamah Syariah Aceh selaku Koordinator 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Wilayah Aceh, Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh, Banda Aceh paling lambat diterima tanggal **22 Juli 2019**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Sekretaris Mahkamah Syariah Aceh,

Khairuddin, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Mahkamah Syariah Aceh (sebagai laporan).



MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jln. Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Tlp. (+6221) - 3843348, 3810350, 3457661
Tromol Pos No. 1020 - Jakarta 10110

Nomor : 223 /BUA.4 /PL.07 /05 /2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eks.
Hal : Permintaan dokumen RKBMN

Jakarta, 22 Mei 2019

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung
 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung
 3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung
 4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
 5. Koordinator Wilayah pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se-Indonesia
- di
Tempat.

Menindaklanjuti surat dari Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan No. S-1012/KN/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Pemberitahuan jadwal penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2021 (terlampir), dengan ini diinformasikan bahwa RKBMN disampaikan paling lambat pada tanggal 18 Oktober 2019 dan harus dilengkapi antara lain :

1. Pengajuan RKBMN tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) ;
2. RKBMN yang diajukan dalam bentuk *hard copy* dan sudah ditandatangani serta stempel dari masing-masing Pengguna Barang (Asli) dan mengedepankan *zero mistake*;
3. Untuk Satker yang mengajukan Usulan Pengadaan Rumah Negara agar dilampirkan data dukung berupa hasil konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat terkait dengan Pembangunan Rumah Negara.

Mengingat pentingnya data tersebut dapat dikirim dalam bentuk *hard copy* dan dimohon agar kelengkapannya segera dikirimkan kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung paling lambat 1 Agustus 2019. Apabila melewati tanggal tersebut akan dianggap tidak mengajukan RKBMN Tahun anggaran 2021. (Contact Person : PB Wilayah I Hp. 0856 7148884 David Achmad Wijaya dan PB Wilayah II Hp. 0812 98799006 Arif Hidayat).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan,

Rosfiana, S.H., M.H.

Tembusan Yth. :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung;
6. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung.